

UPAYA SARKOZY DALAM MEMPERTAHANKAN STABILITAS EKONOMI PERANCIS DI TENGAH KRISIS HUTANG UNI EROPA TAHUN 2008-2012

Muhammad Yamin¹, Yuniarti², Rahmah Daniah³

Abstract : *This research aims to describe the efforts of Sarkozy in maintaining the stability of the French economy in the midst of the debt crisis in the EU in 2008-2012. This type of research is descriptive, and uses the type of secondary data obtained through library research. The theory used to analyze is economic liberalism. The result explains that policy measures taken by Sarkozy in France to maintain economic stability due to the impact of the EU debt crisis. In this case, Sarkozy responded by implementing fiscal policy, namely providing stimulus packages to the French economy and implementing fiscal consolidations, then granting a bailout to French banks that were affected and contributing to a bailout package to Greece in the EU. The impact of this policy was the recovery in French economic and trade growth. The banking system was able to stabilize the French economic system, however, at the level of the French debt-deficit ratio, it is still relatively high.*

Keywords: *EU debt crisis, Sarkozy efforts, Economic stability, Economic liberalism.*

Pendahuluan

Krisis hutang UE yang berawal dari Yunani dipicu oleh krisis finansial global dan tingginya defisit anggaran serta tingkat hutang Yunani mengakibatkan krisis hutang. Krisis tersebut berdampak dan menyebar ke negara anggota UE lainnya yang mengadopsi euro sebagai mata uang seperti Portugal, Italia, Yunani dan Spanyol (PIGS). PIGS juga memiliki tingkat hutang yang melebihi 60% per PDB sebelum krisis hutang terjadi, sehingga ketika krisis hutang Yunani terjadi suku bunga mengalami kenaikan yang mempengaruhi hutang dan defisit anggaran yang berdampak terhadap perekonomian dan nilai euro (Hananaomi, 2015: 10).

Penyebaran krisis hutang UE juga di sebabkan oleh faktor hutang Yunani akibat eksposur (risiko) terhadap krediturnya yang sebagian besar merupakan bank negara anggota UE, di antaranya Perancis, Swiss, Jerman, Belanda dan Inggris (Khairunnisa, 2018:3). Faktor lainnya kurangnya kerangka kerjasama UE untuk mengantisipasi krisis hutang dan mekanisme pemulihan yang efektif, seperti kurangnya kelembagaan untuk mengawasi bank-bank di UE serta kegagalan lembaga moneter UE dalam mengawasi situasi ekonomi berkaitan dengan defisit anggaran dan tingkat hutang anggota UE (bappenas.go.id, 2011).

Dalam upaya mengatasi krisis hutang dan dampak yang menyebar ke negara-negara UE, *European Commission* (EC), *European Central Bank* (ECB) dan *International Monetary Fund* (IMF) atau Troika memberikan paket *bailout* ke Yunani untuk menyelamatkan perekonomian akibat resesi ekonomi. Troika memberikan *bailout* sebesar €110 miliar (Fitrihani, 2015: 28). Selain paket *bailout*, Yunani juga menerima

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : iammuhammadyamin@gmail.com

² Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda.

³ *Ibid.*

bantuan pinjaman dari bank negara UE salah satunya bank Perancis yang menjadi kreditur terbesar Yunani sebesar 25% dan Italia (Kindreich, 2017). Sedangkan total eksposur dari bank Perancis ke negara PIGS sekitar €334.8 miliar. Bank Perancis menjadi bank yang paling terpapar langsung ke PIGS di antaranya Bank *Societe Generale*, *Credit Agricole*, BNP Paribas, *Crédit Mutuel*, *Caisse d'Epargne* dan *Populaire*. Oleh karena itu ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi di PIGS menyebabkan ekonomi Perancis terdampak di segala sektornya (Howarth, 2013: 4). Sektor Perancis yang terdampak krisis hutang UE seperti pada sektor keuangan dan perbankan Perancis dimana terjadi hambatan dalam aktivitas kredit, peningkatan inflasi, defisit anggaran, tingkat hutang, penurunan PDB, sektor perdagangan dan sektor ketenagakerjaan, sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi Perancis.

Akibat dampak krisis hutang UE terhadap stabilitas ekonomi tersebut. Sarkozy mengintervensi perekonomian Perancis untuk pemulihan ekonomi serta menyelamatkan sektor-sektor yang terdampak parah dan mempengaruhi sektor lainnya sehingga dapat menghindari terhambatnya kegiatan perekonomian serta kebangkrutan yang dialami oleh sektor ekonomi Perancis lainnya. Artikel ini menjelaskan upaya Sarkozy dalam mempertahankan stabilitas ekonomi Perancis di tengah krisis hutang Uni Eropa tahun 2008-2012.

Kerangka Dasar Teori

Liberalisme Ekonomi

Liberalisme ekonomi atau neoliberalisme memiliki asumsi dasar dimana, yaitu hukum pasar, kebebasan bagi barang, jasa dan modal, dengan demikian pasar dapat mengatur mekanismenya. Kemudian, mengurangi pembelanjaan publik bagi pelayanan – pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah. *Ketiga*, deregulasi, agar kekuatan pasar dapat bekerja sesuai mekanisme pasar. *Keempat*, mengubah persepsi baik tentang publik dan komunitas menjadi individualisme dan tanggung jawab individual (Harvey, 2005: 7).

Dalam perekonomian liberalisme ekonomi pasar harus dipisahkan dari politik dan peran negara serta tidak seharusnya Tindakan-tindakan ekonomi dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Dalam liberalisme ekonomi terikat pada pasar dan mekanisme harga sebagai cara paling dianggap mampu untuk mengatur hubungan ekonomi domestik dan internasional, oleh karena itu perdagangan internasional (pasar bebas) amat penting sebagai proses untuk mengatur dan mengelolah ekonomi pasar dalam mencapai efisiensi yang maksimum bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu. Hal tersebut juga memungkinkan ketersediaan barang dan jasa yang kompetitif bagi konsumen (Gilpin, 1987: 46).

Peran aktor negara dalam liberalisme ekonomi sangat minim serta negara tidak boleh campur tangan dalam kegiatan pasar (Jackson & Sorensen, 1999: 236), namun liberalisme ekonomi mengakui bahwa negara berperan untuk menetapkan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi, menyediakan lingkungan yang menguntungkan bagi pengusaha swasta dan dapat mengintervensi jika kegagalan pasar (*market failure*) terjadi karena dapat menghambat kinerja perekonomian dan pasar (Gilpin, 1987: 68).

Liberalisme ekonomi mendefinisikan kegagalan pasar (*market failure*) untuk menggambarkan situasi di mana pasar gagal menghasilkan hasil yang optimal secara ekonomi atau yang diinginkan oleh sosial (Gilpin, 1987: 68). Kegagalan pasar (*market failure*) terjadi disebabkan karena beberapa faktor, *pertama* yaitu eksternalitas atau limpahan dari aktivitas ekonomi dimana pelaku kegiatan ekonomi mengakibatkan

kerugian terhadap pelaku ekonomi lainnya. *Kedua* monopoli, kartel dan kolusi, dimana meningkatnya pengembalian dan penurunan biaya marginal yang mengarah pada monopoli yang membuat pembeli atau penjual tidak memiliki pilihan dalam bertransaksi selain terhadap pihak tertentu. Serta *ketiga* ketidaksempurnaan pasar seperti kekakuan pasar dan kurangnya informasi konsumen (asimetris informasi) dimana satu pihak dalam perdagangan lebih banyak mengetahui tentang produk daripada yang lainnya (Ravenhill, 2014).

Menurut Peter Evans memaparkan beberapa tipe peran ekonomi negara, salah satunya yaitu (Ravenhill, 2014) *Minimal State* yaitu merupakan peran negara yang dilakukan secara tidak langsung dan *non-selectif (non-discriminatory)*. Hal ini berdasarkan pandangan bahwa negara tidak mampu merekayasa pasar, sehingga sebaiknya membiarkan pasar berinteraksi tanpa gangguan. Peran negara terbatas pada upaya eliminasi monopoli, pengadaan *public goods*, pengurangan eksternalitas, pemberlakuan hukum dan intervensi pemerintah sebagai sarana untuk mengoreksi kegagalan pasar serta merangsang stabilitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Peran negara yang minimal juga membuat ekonomi harus dibuka ke dunia luar (pasar bebas) merupakan komponen vital dari neoliberalisme, dimana pemerintah harus menderegulasi dan memprivatisasi ekonomi serta beralih dari substitusi impor ke strategi pertumbuhan yang mengutamakan ekspor. Komponen lain adalah pemerintah harus mengejar kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana dan harus menjaga anggaran yang seimbang untuk menghilangkan inflasi yang tidak terkendali (Gilpin, 1987: 315).

Beberapa kebijakan mengatasi krisis di dalam liberalisme ekonomi menurut para ekonom, diantaranya (Gilpin, 1987: 315) :

1. Meningkatkan likuiditas secara radikal dengan meningkatkan tingkat bunga dasar (dan segala kemungkinan), karena penurunan yang besar dalam aktivitas kredit akibat hilangnya kepercayaan yang diakibatkan oleh krisis.
2. Menyelamatkan dan merekapitalisasi bank- bank besar (meningkatkan kembali permodalan bank).
3. Menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif yang tidak dapat dihindari ketika tingkat bunga mencapai zona perangkap likuiditas.
4. Mengatur kembali sistem keuangan domestik dan internasional.

Keempat poin di atas sebagai tindakan intervensi negara dengan kebijakan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) akibat dampak krisis. Terkait upaya Sarkozy dalam mengatasi dan menstabilkan perekonomian negara Perancis di tengah krisis hutang UE.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pembahasan menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dan memiliki hubungan yang saling berkaitan yang dianggap mendukung permasalahan penelitian yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Krisis hutang UE dipicu oleh faktor eksternal dari krisis ekonomi global yang melanda dunia tahun 2008. Krisis global tersebut mengakibatkan terjadinya *market shock* yaitu, situasi yang mengagetkan pasar modal dalam hal ini global sehingga berdampak terhadap kondisi pasar yang memberi sentimen negatif bagi investor di pasar modal. Dampak kondisi tersebut membuat penurunan keuangan dunia berskala global dan mengancam sektor ekonomi, serta berdampak terhadap pelemahan mata uang sejumlah negara, kepercayaan terhadap pasar uang, terhambatnya akses keuangan dan berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan (Alogoskoufis, 2012). Penurunan tersebut berdampak terhadap bursa perdagangan dunia termasuk negara anggota UE. oleh sebab itu harga saham UE terkoreksi negatif sekitar 3.67% termasuk negara anggota UE lainnya. hal ini memberikan dampak ketidakstabilan ekonomi di UE.

Selain karena faktor eksternal, UE juga memiliki permasalahan internal dimana keseimbangan ekonomi, tingkat produktivitas, pertumbuhan dan ketenagakerjaan di antara negara-negara di UE menyebabkan sistem integrasi kawasan menjadi rentan terhadap krisis. Permasalahan lainnya, terjadinya persaingan ekonomi antara negara-negara UE, namun dalam persaingan tersebut negara-negara seperti Yunani mengandalkan hutang untuk kemajuan ekonominya dengan meminjam hutang bersuku bunga rendah kepada IMF, World Bank dan negara-negara UE lainnya (Kaplanoglou, 2011).

permasalahan internal lainnya adalah diakibatkan oleh masalah internal Yunani dimana besarnya jumlah pinjaman/hutang Yunani terhadap lembaga keuangan negara anggota UE serta sistem pengawasan dan penyusunan anggaran yang tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas membuat Yunani terjebak dalam krisis hutang internal dan defisit yang signifikan yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomian negara-negara UE di antaranya Portugal, Italia, dan Spanyol (PIGS) dan mempengaruhi nilai euro akibat kenaikan suku bunga. Negara-negara PIGS yang terdampak krisis hutang Yunani juga menerapkan penyatuan mata uang tunggal euro (*eurozone*) dan memiliki tingkat hutang yang tinggi melebihi 60% per PDB sebelum krisis ekonomi global (Humphrey, 2011).

selain itu, penyebaran krisis hutang terjadi karena besarnya eksposur hutang Yunani sehingga membebani UE dan negara anggota UE, seperti Perancis, Swiss, Jerman, Belanda dan Inggris. Dari kreditur Yunani tersebut Bank Perancis merupakan kreditur hutang terbesar sekitar 25% tahun 2010 (Kindreich, 2017) . Faktor internal krisis hutang UE selanjutnya adalah kurangnya kerangka kerjasama UE dalam *eurozone* untuk mengantisipasi krisis hutang dan serta kerangka pemulihan yang efektif dan efisien, dan kelembagaan kurang dalam mengawasi bank-bank UE serta kegagalan UE dan lembaga moneternya dalam mengawasi indikator ekonomi seperti defisit dan tingkat hutang negara anggota UE sebelum krisis global terjadi.

Dalam upaya mengatasi dampak rambatan krisis hutang di negara *eurozone*, UE membentuk Troika yang terdiri atas *European Commission*, ECB dan IMF yang memiliki tugas untuk memulihkan kredibilitas *eurozone* dengan langkah pemberian paket *bailout* ke negara yang membutuhkan suntikan dana dalam hal ini Yunani agar keluar dari resesi. Sehingga kestabilan dan pemulihan akibat krisis dapat dikendalikan. Anggaran *bailout* ini sebesar €110 miliar untuk mengendalikan krisis hutang Yunani. Rincian anggaran kontribusi IMF sekitar €30 miliar, sedangkan UE menyumbang dana sebesar €80 miliar yang diambil dari negara anggota UE. *Bailout* ini diluncurkan bertahap dalam rentan waktu 3 tahun dan bunga pinjaman sebesar 5% (Fitrihani, 2015).

Kontribusi besar negara dalam *bailout* adalah Jerman, Perancis, dan Italia. Jerman sebesar €22,3 miliar sedangkan Perancis €16.7 miliar. Selain *bailout*, Yunani juga mendapat pinjaman dari perbankan Perancis sekitar \$93 miliar di tahun 2010 (Allergret et.al, 2018)

Bank perancis adalah kreditur besar Yunani dan Italia, oleh karena itu bank Perancis tergolong bank yang paling terpapar/ rentan, dimana besar hutang Yunani sekitar 25% di tahun 2010. Sedangkan total eksposur/risiko ke negara PIGS mencapai €334.8 miliar di tahun 2010. Akibat besarnya eksposur ke negara PIGS, ketika UE mengalami krisis atau ketidakstabilan ekonomi maka sektor ekonomi Perancis juga terdampak (Allegret et.al, 2018).

Jika dibandingkan perekonomian Perancis sebelum krisis hutang UE terjadi dari tingkat pendapatan dan perekonomian Perancis cenderung stabil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2003 PDB Perancis mencapai \$1.840 triliun naik hingga mencapai \$2.568 triliun tahun 2007. Pada defisit Perancis sekitar 3.6% per PDB pada tahun 2008 dan pada tingkat inflasi di tahun 2006 sekitar 2.4%. Sedangkan tingkat hutang sekitar 64.5% per PDB (countryeconomy.com, 2021) . Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mencerminkan resesi ekonomi yang terjadi akibat dampak krisis hutang UE. Pada ekspor mendukung permintaan yang relatif kuat terhadap beberapa negara terutama Jerman, Spanyol, Italia, Inggris dan Amerika.

Namun, ketika krisis hutang UE terjadi perekonomian Perancis menjadi tidak stabil. Dimana tingkat pertumbuhan PDB turun signifikan sekitar 3.13% antara tahun 2008-2009, defisit meningkat hingga 7.2% per PDB pada tahun 2009. Pada ekspor mengalami penurunan drastis dari \$594 miliar tahun 2008 turun menjadi \$464 miliar dan impor dari \$611 miliar turun menjadi \$540 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan penurunan ekonomi dan deflasi dollar Amerika (wits.worldbank.org, 2008). Di sektor perbankan, bank-bank Perancis mengalami ketidakstabilan dan hambatan terhadap aktivitas keuangan dikarenakan bank-bank Perancis pemegang obligasi/surat hutang swasta dan publik di kawasan UE, terutama Yunani. Dimana bank Perancis memberikan pinjaman dana untuk Yunani pada tahun 2010 sebesar \$93 miliar. Oleh karena itu besarnya risiko (eksposur) terhadap bank Perancis jika Yunani mengalami gagal bayar (*default*) (Fontevencchia, 2011).

Dalam upaya untuk menstabilkan perekonomian Perancis, Sarkozy mengintervensi ekonomi Perancis dengan melakukan kebijakan program pemulihan ekonomi di antaranya pemberian paket stimulus, rekapitalisasi bank dan berkontribusi dalam pemberian dana *bailout* ke Yunani.

1. Pemberian Paket Stimulus Ekonomi

Penerapan dari kebijakan paket stimulus adalah sebagai upaya untuk mengatasi dampak krisis hutang dan untuk memberikan suntikan stimulus ekonomi terhadap bisnis, pengeluaran pemerintah investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi dan transportasi serta mendukung investasi publik. Kebijakan ini secara hukum diatur dalam rancangan anggaran untuk Tahun Anggaran 2009, anggaran tambahan tersebut dirancang pada tanggal 18 Desember 2008 serta disahkan dalam UU No.2009-122 pada tanggal 4 februari 2008. Kebijakan pemberian paket stimulus ini merencanakan anggaran yang bersifat terbatas sebesar €26 miliar berasal dari APBN dan pinjaman. Pada paket stimulus menjadi rancangan anggaran tambahan di tahun anggaran 2009, tanggal 18 februari 2009. Menurut pemerintahan Perancis dalam langkah penerapan kebijakan stimulus akan menargetkan menyelamatkan sekitar 100.000 pekerja yang

mana bersesuaian dengan dampak pertumbuhan sekitar 0.8%. Berikut rincian anggaran Paket Stimulus Perancis 2009 :

Tabel 1
Rincian anggaran Paket Stimulus Perancis 2009

Alokasi Dana	Dana (miliar euro €)
Investasi Publik : 0.5% dari PDB	10.5
Investasi Pemerintah Umum	4.0
- Infrastruktur	1.4
- Penelitian dan pendidikan tinggi	0.7
- Pertahanan militer, ketertiban dan keamanan umum	1.36
- Bangunan bersejarah	0.6
Investasi perusahaan publik	4.0
- EDF	2.5
- GDF Seuz	0.2
- RATP	0.45
- SNCF	0.3
- La Poste	0.6
Dukungan untuk investasi pemerintahan daerah	2.5
-Pembayaran di muka dari FCTVA 2008 pada 2009	
Dukungan Untuk Perusahaan: 0.6% dari PDB	11.4
-Penggantian jumlah yang harus dibayar oleh Departemen Keuangan Terhadap Perusahaan. Pengganti pajak Penelitian, PPN setiap bulan.	
-Depresiasi (Penyusutan) dipercepat dari investasi yang dilakukan pada tahun 2009.	
Dukungan untuk sektor perumahan dan sektor otomotif :0.1% dari PDB	2
Sektor perumahan	1.8
-Menggandakan ukuran kredit hipotek suku bunga 0%	0.6
-Membangun 100.000 unit rumah	0.6
-Renovasi perkotaan, Investasi khusus untuk perumahan	0.6
Sektor Otomotif	0.2
-skema <i>scrappage</i> mobil (diskon mobil)	
Kebijakan ketenagakerjaan	1.2
-Insentif untuk penciptaan lapangan kerja di perusahaan dengan kurang dari 10 pekerja	0.7
-Kebijakan ketenagakerjaan aktif (kontrak profest transisi)	0.5
Kebijakan sosial	
-Bonus untuk mereka yang berpenghasilan rendah : <i>Prime de solidarite active</i> (PSA)	
Tunjangan Sosial pada 2009	2
-Tunjangan pengangguran	0.25
-Tunjangan keluarga	0.8
-Pemotongan pajak penghasilan	1.1

Sumber: ministry for the economy and finance.

Sarkozy menekankan terjadi kenaikan di investasi publik Perancis sebagai langkah perbaikan ekonomi jangka pendek dan tidak menambah hutang publik. Sementara itu, bantuan untuk pembiayaan perusahaan di sektor perumahan dan otomotif sebagai langkah mendukung perusahaan Perancis dalam pembiayaan jangka pendek supaya kinerja perusahaan berjalan stabil di tengah situasi dampak krisis hutang, sehingga perusahaan mampu mempertahankan tingkat ketenagakerjaan.

Setelah penghentian paket stimulus di tahun 2010 untuk melanjutkan langkah pemulihan ekonomi. Sarkozy mengambil kebijakan konsolidasi fiskal sebagai langkah untuk mengatasi defisit anggaran pemerintah dan tingkat hutang Perancis. Kebijakan ini

dilakukan dengan cara peningkatan pendapatan dan penghematan untuk mengembalikan stabilitas keuangan publik Perancis. Menargetkan pemulihan defisit dalam kebijakan di bawah 3% per PDB di tahun 2013. Berikut dapat dilihat rincian upaya kebijakan konsolidasi fiskal di bawah ini :

Tabel 2
Rincian Langkah-langkah Konsolidasi Utama.
miliar euro € (% per PDB)

		2011	2012-14
Pengeluaran		24.5	11.5
		(1.23)	(0.52)
1. Langkah- langkah Operasional		7.0 (0,35)	1.5 (0,07)
-Konsumsi Publik	Pengeluaran publik riil akan dibekukan dalam periode 3 tahun mencakup 2011-13 (tidak termasuk pembayaran bunga dan pegawai negeri pensiun).		
	Peningkatan pertumbuhan belanja publik nominal keseluruhan akan dibatasi pada 0.8% dari 2011-14.	7,0 (0,35)	
	Belanja pemerintah pusat saat ini akan dipotong 10% selama tiga tahun, dimulai dengan 5% pada tahun 2011.		
	pembekuan nominal transfer operasional dari pemerintah pusat ke daerah.		
	membekukan keselamatan nasional dan norma peraturan lainnya.		
-Upah	Basis yang mendasari upah sektor publik akan stabil secara nominal di 2011		
-Kepegawaian	Dalam tiga tahun, hanya satu dari dua pensiunan pegawai negeri yang akan diganti, yang mengarah ke 97,000 PHK publik yang diproyeksikan		1,5 (0,07) pada tahun 2013
2. Langkah- langkah program		17,5 (0,88)	10 (0,45)
-Penarikan Stimulus pengukuran		15,0 (0,75)	
-Kesehatan	Aturan pengeluaran untuk pendanaan kesehatan (ONDAM)	2,5 (0,13)	
-Reformasi Pensiun	Efek Konsolidasi bersih		10 (0,45) pada tahun 2013
Pendapatan		21,5	9 (0,40)
		(1,08)	
-Pajak Penghasilan	Kenaikan tarif pajak penghasilan teratas dari 40% menjadi 41%		
-Pajak Keuntungan <i>real estate</i>	Pajak <i>Capital gain</i> atas <i>real estate</i> naik dari 16% menjadi 19%	10,0 (0,50)	
-Pajak bank	Pajak atas bank yang diperkenalkan	0,5 (0,03)	
-Pengeluaran pajak	Pengurangan pengeluaran pajak		9 (0,40)
		11,0 (0,55)	3 per tahun 2012-14

Sumber : "OECD Fiscal Consolidation Survey 2010" (OECD, 2011)

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi anggaran di pemerintah Perancis, reformasi ini berkaitan aturan fiskal untuk mengurangi defisit struktural di lembaga pemerintahan dan tingkat hutang publik Perancis. Berikut rancangan konsolidasi fiskal pemerintah di bawah ini :

Tabel 3
Rancangan Konsolidasi Fiskal Pemerintah

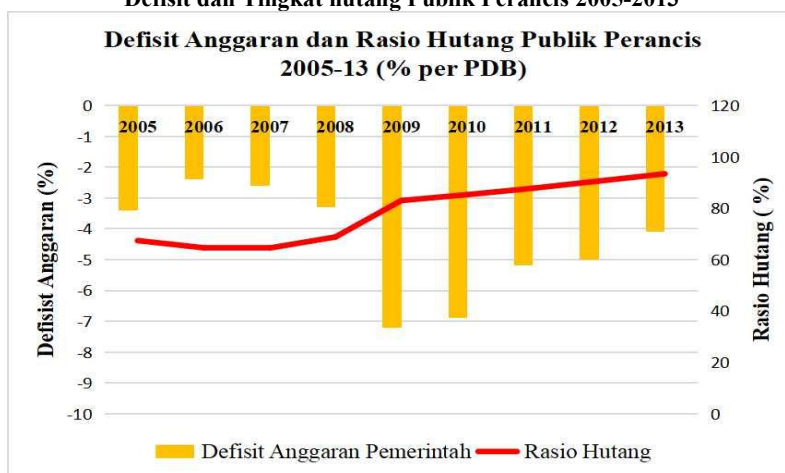
Konsolidasi Fiskal	2010	2011	2012	2013	2014
Jalur Konsolidasi		2.3%			3.2%
Total Defisit (-)/ Surplus (+)	-7.7%	-6.0%	-4.6%	86.6%	
Total tingkat hutang	93.2%	86.1%	96.7%	86.6%	
Konsolidasi fiskal dengan pengurangan pengeluaran dan pendapatan peningkatan (total= 100%)					
Pengurangan Pengeluaran		53%		56%*	
Peningkatan Pendapatan		47%		44%*	

Sumber : “Survei Konsolidasi Fiskal OECD 2010” *Data Periode 2012-14

Dampak/implikasi penerapan kebijakan stimulus terhadap pemulihan ekonomi Perancis, yaitu di kuartal pertama (Q1) tahun 2009 pertumbuhan dari PDB mengalami penurunan dan di tahun 2010 pertumbuhan Perancis meningkat sebesar 1.95%. Hal tersebut didorong oleh konsumsi yang kuat dari permintaan domestik dan pembangunan. Kontribusi dari nilai perdagangan ekspor positif walaupun masih tergolong kecil pada tahun 2010.

Sedangkan implikasi dari kebijakan konsolidasi fiskal terhadap defisit anggaran dan tingkat hutang Perancis antara periode tahun 2010-2011 terjadi pengurangan terhadap defisit dari 6.9% menjadi 5.2% dan berkurang hingga tahun 2013. Berikut ini data grafik defisit anggaran dan tingkat rasio hutang :

Grafik 1
Defisit dan Tingkat hutang Publik Perancis 2005-2013



Sumber : Countryeconomy/state/debt and deficit.

Hal ini didorong oleh pemulihan ekonomi dan pertumbuhan Perancis yang terus mengalami peningkatan setelah penerapan kebijakan stimulus pada tahun 2009. Namun penurunan defisit pada tahun 2010 masih tergolong tinggi karena target pemerintah penurunan defisit di bawah 3% sedangkan standar defisit ECB (*European Central Bank*) sekitar 2% dari PDB. Sementara itu tingkat hutang Perancis, sejak mengalami peningkatan tajam pada tahun 2009 sekitar 83%, hutang Perancis mengalami kenaikan setiap tahunnya dan di tahun 2012 tingkat hutang per PDB Perancis sebesar 90.6% (countryeconomy.com, 2021).

Sektor ketenagakerjaan Perancis, kebijakan pemerintah memberikan dampak/implikasi terhadap tingkat pengangguran pada tahun 2010 berada di kisaran 9.3% turun menjadi dikisaran 9.2% pada tahun 2011. Meskipun tingkat pengangguran Perancis mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan berkurang pada periode tahun 2010-2011. Jika dibandingkan tingkat pengangguran pada tahun 2008 berada di kisaran 7.4% kemudian di tahun 2009 pengangguran Perancis melonjak menjadi 9.1% yang diakibatkan oleh dampak krisis hutang, oleh karena hal tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi Perancis. Pada tingkat upah Perancis akibat dari kebijakan stimulus dalam jangka waktu pendek mengakibatkan tingkat upah cenderung bersifat dinamis.

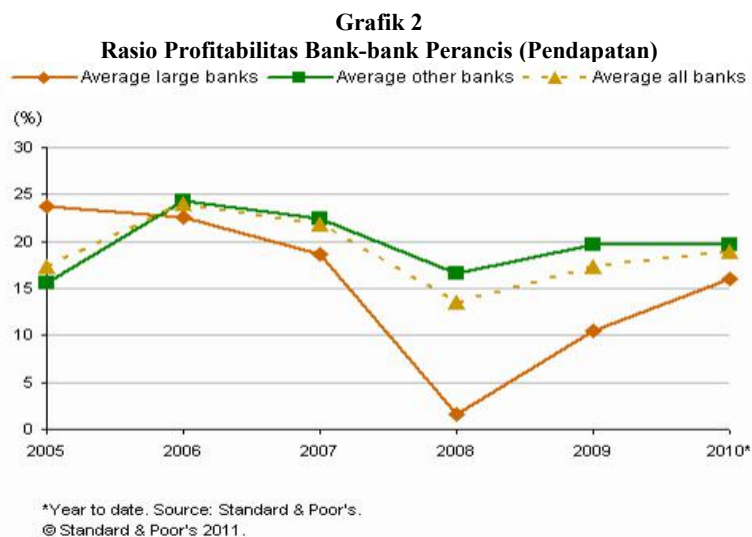
Kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi memberikan implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan pembangunan Perancis serta membantu menurunkan defisit anggaran pemerintah, namun penurunan defisit anggaran pemerintah masih tergolong tinggi dimana pemerintah menargetkan penurunan hingga di bawah 3% serta tingkat hutang yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari periode 2008-2012 dan dibutuhkan langkah lebih lanjut untuk menurunkan tingkat hutang Perancis.

2. Rekapitalisasi terhadap Bank-bank di Perancis

Kebijakan selanjutnya untuk memulihkan sektor perbankan Perancis, Sarkozy melakukan langkah rekapitalisasi (suntikan modal) terhadap bank-bank di Perancis dengan tujuan untuk menalangi (*bailout*) ke sistem perbankan Perancis sebagai langkah untuk memulihkan kegiatan dan arus kas keuangan bank, dimana khususnya di pasar antar bank yang sempat mengalami kelumpuhan akibat dampak krisis hutang di kawasan. ketika awal pengumuman *default* Lehman Brother, Sarkozy menyediakan dana sebesar €360 miliar untuk sistem perbankan Perancis dimana dana €320 miliar diperuntukkan sebagai bantuan dan pembiayaan kembali perbankan perusahaan publik yang disebut *Société De Financement De L'économie Française* (SFEF), sementara dana €40 miliar diantaranya dipergunakan untuk memperkuat basis modal bank-bank Perancis (Plumb & Ponthus, 2011).

Dalam langkah rekapitalisasi ini untuk menopang enam bank besar di Perancis anggaran yang dikeluarkan sebesar €10.5 miliar di antaranya, Bank *Credit Agricole* menerima dana sebesar €3 miliar, Bank BNP Paribas sebesar €2.55 miliar, Bank *Societe Generale* mendapatkan suntikan sebesar €1.7 miliar untuk mendukung pemberian pinjaman akibat dampak krisis hutang, Bank *Credit Mutuel* menerima suntikan sebesar €1.2 miliar, Bank *Caisse d'Epargne* menerima sekitar €1.1 miliar dan *Banque Populaire* menerima sebesar €950 juta (france24.com, 2008). Hal ini dilakukan dengan maksud agar memastikan bank Perancis dapat membenahi dan membiayai perekonomiannya dengan baik.

Setelah penerapan kebijakan *bailout* terhadap perbankan Perancis, bank-bank relatif lebih kuat terhadap krisis finansial global dan sebagian besar telah keluar dari dukungan negara terkait krisis hutang. Respon kebijakan *bailout* dan stimulus pemerintah terhadap langkah pemulihan ekonomi berhasil menstabilkan sistem keuangan dari penurunan nilai aset dan keuntungan bank-bank Perancis meningkat sejak tahun 2008, berikut data tingkat rasio profitabilitas/keuntungan bank-bank Perancis di bawah ini:



Dari data grafik diatas, peningkatan keuntungan dan secara signifikan mampu memenuhi rasio kecukupan dari modal inti (*Tier 1*) dan meningkat dari 8.7 di tahun 2008 menjadi 10.2 di tahun 2009 (Grandin, 2011). Tier 1 bank Perancis berada di atas rata-rata negara UE lainnya yaitu 9.1. walaupun mengalami pemulihan pada bank Perancis, bank juga menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh pemulihan ekonomi yang rapuh dan kekhawatiran pada tingkat hutang di kawasan UE.

Masih rentannya pemulihan di sektor keuangan ini disebabkan oleh pertumbuhan kredit swasta yang dikatakan lambat karena penurunan tingkat kredit perusahaan bukan dikarenakan kekurangan modal, terutama sektor korporasi (perusahaan) (Grandin, 2011). penurunan kualitas kredit mengalami tekanan akibat dari kredit bermasalah dan pelemahan pertumbuhan kredit serta tekanan terhadap pendanaan juga dapat kembali meningkat jika krisis hutang kawasan terus berlanjut.

3. Stabilisasi Ekonomi Kawasan *Eurozone* melalui *Bailout* Yunani

Dalam upaya langkah untuk pemulihan dan stabilisasi kawasan *eurozone*, Sarkozy menjadi salah satu pemimpin negara anggota UE yang mendukung kebijakan pemberian paket *bailout* ke Yunani ketika awal Yunani mengumumkan *default* (gagal bayar) pada Maret 2008. Sementara kanselir Angela Merkel menolak usulan tersebut dan lebih memprioritaskan penanganan krisis melalui cara-cara lain. Namun ketika eskalasi krisis hutang meningkat dan mempengaruhi perekonomian negara-negara lain di kawasan UE pilihan kebijakan *bailout* disetujui.

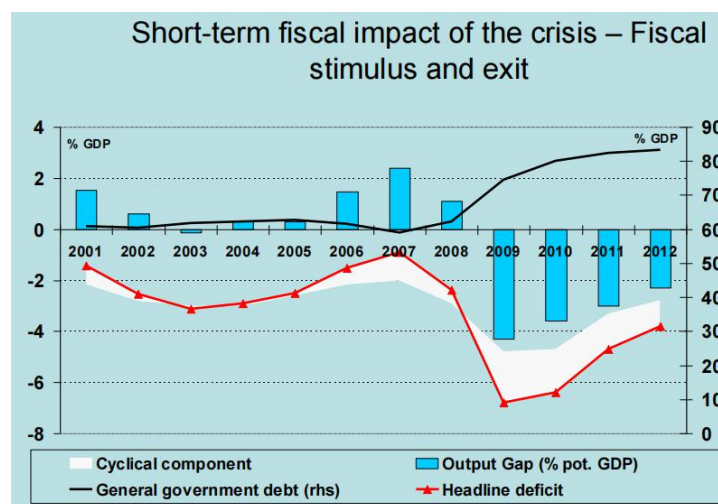
Pada Mei 2010, anggota negara-negara di *eurozone* bersama ECB (*European Central Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*) menyetujui pemberian paket *bailout* ke Yunani sebagai langkah untuk mengatasi dampak krisis yang mempengaruhi negara-negara di UE. pada *bailout* ini IMF berkontribusi sebesar €20.1 miliar sedangkan kontribusi negara-negara UE dengan total €80 miliar yang dihimpun oleh

parlemen UE dibawah fasilitas hutang Yunani. Dalam proses pencairan dana paket *bailout* pertama bantuan dilakukan pada bulan Mei 2010 dan pencairan keenam dilakukan pada bulan Desember 2011 (Beardsley, 2010).

Dalam kontribusi *bailout* tersebut Perancis berkontribusi terbesar kedua setelah Jerman sebesar 27.92%, sedangkan Perancis sebesar €16.8 miliar atau sekitar 20.97% dari total kontribusi dana *bailout* negara-negara UE. kontribusi Perancis tersebut disetujui oleh senat Perancis pada tanggal 8 September 2008 terkait kontribusi Perancis terhadap penyelamatan Yunani (ec.europa.eu, 2010).

Dampak langkah *bailout* tersebut jangka pendek terhadap perekonomian UE dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3
Dampak fiskal jangka pendek dari krisis Fiskal Stimulus dan keluar



Defisit pemerintah negara-negara UE mengalami perbaikan dari periode tahun 2009-2011, namun di tingkat tingkat hutang pemerintah negara-negara di UE mengalami kenaikan setiap tahunnya antara periode tahun 2009-2012. Karena langkah *bailout* terhadap perekonomian Yunani, perdagangan pada pasar modal sempat stabil, namun pada bulan Oktober 2010 obligasi dan sekuritas Yunani anjlok sehingga selisih harga pada pasar melonjak (eu-information-service.rs-consulting.com, 2008).

Pada pertumbuhan pendapatan di negara-negara *eurozone* melambat 1.5% di tahun 2011 yang sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2010 sekitar 1.9%. pertumbuhan PDB pada dasarnya didorong oleh perdagangan luar negeri yang berkontribusi terhadap tingkat pendapatan sebesar 1.0% pertahun (eu-information-service.rs-consulting.com, 2008).

Kebijakan *bailout* Troika terhadap Yunani tidak maksimal memperbaiki perekonomian karena masalah internal Yunani dimana pengeluaran dan belanja pemerintah membengkak dan tidak mengutamakan pendanaan jangka panjang dan konsumsi impor melebihi ekspornya, dalam hal lain seperti lemahnya transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintahan Yunani. Institusi UE yang berfokus pada pemulihan stabilitas finansial kawasan dibandingkan penanganan terhadap krisis finansial Yunani membuat pengambilan keputusan menjadi tidak maksimal.

Kesimpulan

Sebagaimana hasil dari analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan upaya Sarkozy untuk mengatasi dampak krisis hutang UE terhadap perekonomian Perancis di respon dengan menerapkan kebijakan fiskal yaitu paket stimulus, kemudian pemberian *bailout* ke sistem perbankan Perancis yang terdampak dan berkontribusi terhadap paket *bailout* ke Yunani dalam wadah UE.

Penerapan kebijakan paket stimulus dan *bailout* untuk perbankan berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi Perancis dan investasi yang sebagian besar didorong oleh konsumsi dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut juga menurunkan defisit anggaran pemerintah secara signifikan walaupun masih tergolong tinggi namun pada tingkat hutang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sarkozy juga giat untuk menyuarkan bantuan dana talangan untuk negara terdampak parah krisis hutang UE yang mana atas usulan Sarkozy tersebut dalam forum internasional UE menyetujui pemberian paket *bailout* ke Yunani dalam kerangka Troika.

Daftar Pustaka

- Alogoskoufis, George, "Greece's Sovereign Debt Crisis: Retrospect and Prospect", Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe (2012): 25-26.
- BAPPENAS, BAB 24 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro", dalam <https://www.bappenas.go.id/files/1213/5229/9964/bab-24-pemantapan-stabilitas-ekonomi-makro.pdf>.
- Beardsley, Eleanor, 2010, "Greek bailout divides French and German Population" Terdapat pada <https://www.dw.com/en/greek-bailout-divides-french-and-german-populations/a-5521605>
- Countryeconomy, ' French", Terdapat pada <https://countryeconomy.com/national-debt/france> dan <https://countryeconomy.com/deficit/france>
- European Commision, 2018, "Stability and Growth Pact",terdapat pada https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/applying-rules-stability-and-growth-pact_en .
- European Parlemt, "Economic Recovery Packages in UE Member States", Terdapat pada <http://eu-information-service.rs-consulting.com/Policy%20Department%20A%20-%20Economic%20and%20Scientific%20Policy/1.%20Economic%20and%20Monetary%20Affairs/1.3.%20Briefing%20Notes/Economic%20Recovery%20Packages%20in%20EU%20Member%20States.pdf>
- Fitrihani, Diah Nur, 2015, "Bailout pertama Yunani dan implementasi pada stabilitas finansial Yunani". Terdapat pada <http://repository.unair.ac.id/17892/8/5.%20BAB%202%20GAMBARAN%20UMUM.pdf>
- Fontevicchia, A, 2011, "France Bank Hold \$93B In Greek Debt As Sarkozy Announces Rollover Deal", Forbes Terdapat pada <https://www.forbes.com/sites/afontevicchia/2011/06/27/french-banks-hold-93b-in-greek-debt-as-sarkozy-announces-rollover-deal/>

- French 24,” *French government in 10.5 bilion euro bank bailout*” Terdapat pada <https://www.france24.com/en/20081020-french-government-105-billion-euro-bank-bailout-financial-crisis>
- Gilpin, Robert, 1987,”*The Political Economy of International Relations*”Princeton Univ Press : New Jersey.
- Grandin, Elisabeth, 2011,”*French Banks Proved Resilient To Crisis But Will Need To Bulk Up Ahead Of Stricter Regulation*” Terdapat pada <http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/banks.pdf>
- Hananaomi, Febi. “*Efek Domino Krisis Euro Zone Terhadap Negara Italia*”, (Pekanbaru: Universitas Riau, 2015).
- Harvey, David, 2005,”*A Brief History of Neoliberalism*”. Oxford University Press Inc : New York.
- Howarth, David,” *France and the International Financial Crisis: The Legacy of State-led France*”. Terdapat pada <https://core.ac.uk/download/pdf/19334977.pdf>
- Humphrey, Wangke, “*Krisis Utang di Zona Euro*”, Terdapat di [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_si ngkat/Info%20Singkat-III-22-II-P3DI-November-2011-4.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_si%20ngkat/Info%20Singkat-III-22-II-P3DI-November-2011-4.pdf)
- Jackson, Robert dan Georg Sorensen, 1999,”*Introduction to International Relations*”. Oxford University Press Inc : New York.
- Kaplanaglou, Georgia & Vassilis T. Rapanos, “*The Greek Fiscal Crisis and the Role of Fiscal Governance*”, London School of Economic and Political Science. 2011: 22-24
- Khairunnisa, K, 2018,” Upaya Yang Dilakukan Oleh Uni Eropa Dalam Menanggulangi Krisis Ekonomi Yang Terjadi Di Yunani Pada Tahun 2008-2017 Terdapat pada <http://scholar.unand.ac.id/39944/2/2.%20BAB%201.pdf>
- Kindreich, Adam,” *The Greek Financial Crisis (2009-2016)*” Terdapat pada <https://www.econcrises.org/2017/07/20/the-greek-financial-crisis-2009-2016/>
- OECD ,”*Restoring Publik Finances*”, Terdapat pada <https://www.oecd.org/gov/budgeting/47840767.pdf>
- Plumb, Christian & Ponthus, Julien, 2011,”*France seen moving towards bank bailout*”, Terdapat pada reuters.com/article/us-france-banks/france-seen-moving-towards-bank-bailout-idUSTRE78P2AT20110926.
- Ravenhill, John. 2014,”*Global Political Economy*”Oxford Univ Press: United Kingdom..
- WITS, “*Trade Summary for France*” Terdapat Pada <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/FRA/Year/2008/Summary>